

Pemetaan Sosial Dan Konflik Di Kawasan Hutan Desa Borissallo, Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa

Mulyadi

Peneliti Sulawesi Community
Foundation

Abstrak

Tulisan ini mendeskripsikan mengenai persoalan keamanan tenurial bagi rakyat di dalam kawasan hutan di Desa Borissallo, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. Desa ini adalah desa dengan luas sebagian besar kawasan hutannya merupakan kawasan hutan produksi yang konsesinya diberikan kepada PT. Inhutani (persero). Karena konsesi dikuasai oleh PT Inhutani, sementara masyarakat desa, yang telah bermukim lama disana dilarang mengakses sumberdaya hutan, maka seringkali terjadi konflik penguasaan.

Kata Kunci: Konflik, Pemetaan Sosial, Kemiskinan

A. Pendahuluan

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 188.332 Ha dengan luas kawasan Hutan seluas 61.033,70 ha atau 2,88 % dari luas kawasan hutan di provinsi Sulawesi selatan yaitu 2.118.992 Ha. Kawasan hutan di kabupaten Gowa seluas 61.033,70 Ha k terdiri atas Hutan Lindung 21.865,03 Ha, Hutan Produksi 15.871,66 dan Hutan Produksi Terbatas seluas 23.297,01.

Jumlah penduduk di kabupaten Gowa adalah sebanyak 709.386 jiwa (4,19 % dari jumlah penduduk Sulawesi selatan (*Sulawesi selatan dalam angka, BPS 2015*) sementara jumlah penduduk yang terdapat di dalam dan sekitar kawasan hutan di wilayah kabupaten Gowa sebanyak 718 KK (*RPHJP KPH Jeneberang, 2015*) yang tersebar pada 6 wilayah

Dari luas kawasan hutan yang ada, berdasarkan SK.607/Menhut-II/2012 terdapat IUPHHK-HTI PT Inhutani I dengan luas areal 18.350 Ha yang meliputi wilayah kecamatan Parangloe, Manuju, Bungaya, Biringbulu, Bontolempangan, Tinggi Moncong. Areal yang dikelola oleh PT. Inhutani I di kabupaten Gowa mencapai + 30% dari luas kawasan hutan di kabupaten Gowa. Luas IUPHHK-

HTI PT. Inhutani tersebut telah mengalami revisi dari luas sebelumnya yaitu 24.780 Ha berdasarkan SK No 266/Kpts-II/1986.

Berkurangnya luasan areal PT. Inhutani disebabkan selain berhenti beroperasinya PT. Kertas Gowa sebagai pasar tujuan produksi PT. Inhutani, juga disebabkan karena tekanan masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah kawasan inhutani.

Walaupun pada tahun 2012 berdasarkan SK IUPHHK-HTI nomor Sk.607/Menhut-II/2012, wilayah areal kerja PT. Inhutani I telah berkurang menjadi 18.350 Ha namun masih terdapat masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan wilayah tersebut untuk penghidupan mereka.

Kondisi dan situasi ini menyebabkan ketidakpastian dan konflik antara masyarakat yang bergantung hidupnya pada kawasan hutan dan PT. Inhutani selaku pemangku wilayah berdasarkan SK IUPHHK-HTI yang dikeluarkan. Ketidakpastian dan konflik yang terjadi berdampak pada pengelolaan kawasan wilayah tersebut menjadi tidak berjalan dengan baik.

Selain berdampak pada pengelolaan kawasan hutan, konflik dan ketidakpastian tersebut juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang berada sekitar kawasan tersebut.

I. Keadaan umum lokasi

A. Sejarah desa

Desa Borissallo adalah desa kuno yang sejarahnya terkait dengan entitas adat pada kerajaan Borissallo. Wilayah kerajaan ini mencakup seluruh wilayah kecamatan Parangloe, Kecamatan Manuju dan daerah-daerah di sekitarnya. Kerajaan borissallo diketahui menjadi salah satu daerah di bawah kerajaan Gowa, meski versi-versi lokal menyebutkan kerajaan ini punya otonomi yang lebih luas dari sekedar kerajaan di bawah Gowa.

Cerita tentang siapa yang pertama menjadi raja dan kemudian memerintah di Borissallo kerap dikaitkan dengan mitologi yang sama dengan yang dikenal di daerah-daerah di Sulawesi selatan terkait sosok Tomanurung. Namun untuk versi di Borissallo, Tomanurung dikenal turun di daerah sekitar Pammolongang. Karena itu,

tomanurung di Borissallo juga sering disebut tomanurunga ri Pammolongang (Profil Desa Borissallo: 2016).

Setelah kemerdekaan, Borissallo berubah dari distrik menjadi kecamatan Parangloe dan wilayah Borissallo sebagian menjadi desa Borissallo. Wilayah ini kemudian terpecah-pecah lagi menjadi desa Lonjoboko, Belapunranga dan dari belapunranga kemudian mekar menjadi satu desa Belabori. Sejak tahun 1966 kepala desapertama telah dipilih. Pappasosong Dg Ngopo terpilih sebagai kepala desa pertama dengan waktu memerintah hingga tahun 1982. Periode setelahnya hingga saat ini telah terpilih 5 kepala desa. Di antaranya adalah Abdul Kadir Mone (1982-1988), Hasanuddin M, S,Sos (200-2005); Harun M Pallo (2008-2012) dan Muhammad Arif (2013-awal 2017) dan saat ini dijabat oleh Camat Parangloe karena kepala desanya mangkat.

B. Keadaan fisik wilayah

1. Letak dan luas desa

Desa Borissallo berada pada 119^o-120^o bujur timur dan 5^o-6^o lintang selatan. Desa Borissallo merupakan salah satu dari 5 desa dan dua kelurahan di kecamatan Parangloe kabupaten Gowa yang terletak di bagian Timur dari ibukota kecamatan dalam wilayah kecamatan parangloe. Luas desa Borissallo adalah 40.70 KM².

Batas-batas wilayah desa Borissallo adalah:

Sebelah utara berbatasan dengan	: kabupaten Maros
Sebelah timur berbatasan dengan	: Desa Bontokassi
Sebelah selatan berbatasan dengan	: Kecamatan Manuju
Sebelah barat berbatasan dengan	: kelurahan Lanna

2. Topografi desa

Desa Borissallo berada pada ketinggian 370-700 MDPL. Kondisi wilayah desa Borissallo 70-8-% terdiri dari bukit dan pegunungan. Menurut database kelerengan desa, rata-rata kelerengan datar (0%-8%) sampai agak curam (6-25%).

3. Iklim

Pada umumnya desa Borissallo memiliki iklim yang cukup bervariasi. Ini dimungkinkan karena desa Borissallo merupakan wilayah yang berada pada ketinggian yang berkisar antara 370-700 MDPL. Tipe iklimnya setiap tahun adalah iklim basah saat curah hujan tinggi dan kering saat kemarau.

4. Tata guna lahan

Lahan di desa Borissallo didominasi oleh Lahan hutan, baik hutan produksi biasa (dalam konsesi Inhutani) maupun hutan produksi biasa di luar konsesi, ada juga kawasan perairan dan areal penggunaan lainnya. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2

Jenis Lahan dan Kegunaan	Luas (m persegi)
Hutan Produksi Biasa (konsesi Inhutani)	609,7 Ha
Hutan Produksi Biasa	1.166,8 Ha
Perairan	25,8 Ha
Areal penggunaan lainnya	1.526

Sumber: BPS 2010/RT/RW Sulawesi Selatan

C. Keadaan sosial ekonomi masyarakat

1. Penduduk

Jumlah penduduk desa Borissallo adalah 3.067 Jiwa yang terdiri atas 1476 laki-laki dan 1.591 jiwa perempuan. Berdasarkan jumlahnya perdesun dibawah ini dijelaskan oleh tabel jumlah penduduk berdasarkan dusun dan jenis kelamin:

No	Dusun	Jumlah Penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	perempuan	Total
1	Bontojai	910	1.017	1.927
2	Pakkolompo	566	574	1.140
	TOTAL	1.476	1.591	3.067

2. Mata pencaharian

Kebanyakan penduduk desa borissallo bekerja sebagai petani yakni 91,18% dan sebagian lainnya adalah pedagang (7,35%), sektor jasa (1,47) dan PNS/swasta (1,80%). Berikut tabelnya:

Jenis Pekerjaan	Persentase
Petani	91,16
Pedagang	7,35
Sektor jasa	1,47
PNS/Swasta	1,80
Jumlah	100

3. Pendidikan

Pendidikan yang ditempuh	Jumlah yang terlibat (orang)
SD	655
SMP	388
SLTA/sederajat	167
Strata satu (s1)	32
Total	1.242

4. Sarana dan prasarana

A. Prasarana Perhubungan

Prasarana perhubungan di desa Borissallo adalah jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah di dalam desa dan antara desa Borissallo dengan desa lainnya. Jalan di desa Borissallo berdasarkan statusnya adalah 4 KM jalan Provinsi dan 105 KM jalan desa. Jalan ini ditambah dengan adanya 3 buah jembatan dan 29 buah Plat Dwekker (Profil Desa Borissallo tahun 2016)

B. Prasarana Kesehatan, Sanitasi dan Air bersih

1. Prasarana kesehatan diantaranya adalah:

Pustu (puskesmas Pembantu)	1 buah
Posyandu	3 buah

2. Sanitasi dan Air bersih

Air bersih yang dipakai oleh masyarakat Borissallo bersumber dari mata air yang dikelola oleh pemerintah dengan menempatkan bak penampungan di beberapa

tempat yang mudah dijangkau oleh pemukiman penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan akan air, desa Borissallo menggunakan 3 sumber air yaitu dari sungai Jene berang, air pegunungan dan sumur biasa. Pemenuhan air untuk lahan pertanian bersumber dari air hujan dan mata air sungai jeneberang dan sungai kecil yang berasal dari kampung Bontojai dan Pakkolompo.

C. Sarana peribadatan

Masyarakat desa borissallo pada umumnya mayoritas beragama islam. Rituinitas peribadatan bertempat di masjid, jumlah masjid di desa Borissallo adalah 7 unit, masing-masing 4 unit di dusun Bontojai dan 3 Unit di dusun pakkolompo.

5. Kelembagaan desa

Struktur organisasi pemerintahan desa sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Berdasarkan Perda Kabupaten Gowa No. 5 Tahun 2001 tentang struktur pemerintahan desa, maka struktur pemerintahan desa Borissallo pada umumnya sama dengan desa-desa yang lainnya di kecamatan Parangloe yakni terdiri dari kepala desa dan dibantu oleh seorang sekertaris dan tiga orang kepala urusan, yakni kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan dan kepala urusan umum serta tenaga harian lepas. Selain itu terdapat dua orang kepala dusun sebagai pelaksana unsur kewilayahan yaitu kepala dusun Bontojai dan kepala dusun Pakkolompo. Desa Borissallo terdiri dari 2 dusun 2 RT dan 7 RK.

II. Hasil dan pembahasan

A. Sejarah penguasaan lahan di desa

Penggunaan lahan desa di desa Borissallo amat terkait dengan perkampungan lama kerajaan Borissallo yang dulu berpusat di wilayah yang saat ini masuk dusun Pakkolompo, bahkan disini masih terdapat rumah adat kerajaan Borissallo. Wilayah dusun ini berada di tengah-tengah Hutan produksi biasa yang bagian dari wilayah konsesi Inhutani maupun di luar konsesi Inhutani. Jika melihat

struktur ruang pusat kerajaan ini, maka kita bisa menyimpulkan jika wilayah kelola masyarakatnya berada di dalam hutan yang saat ini adalah hutan produksi.

Wilayah kelola ini dimaknai dalam arti mengambil kayu dari tegakan hutan alamiah maupun mengambil manfaat lain seperti mengambil sari pohon aren, madu hutan, binatang buruan maupun penggembalaan ternak serta aktifitas budidaya pertanian berpindah.

Di era tahun 1966, ketika Borissallo telah menjadi desa dibawah kepemimpinan Pappasong Dg Ngopo telah banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah desa dides seperti membangun bendungan, sarana irigasi dan jembatan yang menghubungkan wilayah desa yang berada di hutan yakni pakkolompo dengan wilayah yang lebih dekat ke jalan raya sebagai pusat desa.

B. Potensi dan permasalahan hutan kemitraan di desa

A. Potensi

Dari penelusuran ke salah satu kelompok tani utama yang menggarap di hutan Pakkolompo bernama Kelompok Tani Hutan Pencinta Alam Mandiri pimpinan Muhammad Tahir beberapa anggota dari kelompok tani ini memiliki lahan garapan hutan konsesi Inhutani selain lahan di sawah dan kebun milik. Sejak menggarap secara tumpangsari, masyarakat bisa mendapatkan kembali manfaat dari lahan hutan dan mengangkat derajat dan martabat keluarganya. Sebagai contoh, setelah memperjuangkan hak kelola atas lahan neneknya di dalam kawasan konsesi Inhutani seluas 12 hektare dan menerbitkan SPPT untuk lahan itu, pendapatan pak Tahir menjadi meningkat.

Salah satu potensi yang dapat didorong sebagai langkah untuk merealisasikan hutan kemitraan adalah apa yang telah diraih oleh Pak Tahir sebagai ketua kelompok tani untuk memperjuangkan lahan garapan, mengelolanya dengan bertanggungjawab dan mampu mengangkat martabat keluarganya sebagai petani yang cukup mendapat manfaat dari menggarap lahan. Ini bisa menjadi best practice bagaimana mengelola dan memanfaatkan hutan konsesi. Hal ini akan berdampak lebih baik lagi seandainya wilayah konsesi yang bersinggungan langsung dan dikelola oleh masyarakat diserahkan dan dilegalisasi hak garapnya melalui hutan kemitraan. Legalitas akses tersebut akan berdampak pada produktifitas dan kebertanggungjawaban petani atas wilayah kelolanya.

Lahan-lahan konsesi yang luas akan membuat wilayah yang dikeluarkan untuk hutan kemitraan tidak akan cukup berarti dan membebani penurunan produktifitas dan luasan lahan Inhutani, justru akan menambah produktifitas sebab masyarakat akan ikut menjaga dan menjadikan hutan sebagai tanggungjawab bersama.

B. Masalah

Salah satu masalah mendasar untuk menerapkan hutan kemitraan di desa Borissallo untuk meningkatkan produktifitas masyarakat miskin adalah perangkat-perangkat desa tidak selektif memilih dan menyasar penerima manfaat dari program yang akan dilaksanakan ini, sebab jaringan kekeluargaan amat lekat di desa Ini.

Masyarakat mungkin akan menyambut program ini tetapi, kebanyakan akan masih sangat khawatir jika saja ini hanyalah program yang tidak akan sampai manfaatnya kepada mereka. Fragmentasi antara elit di kecamatan yang memiliki kekuasaan tradisional di wilayah desa akan menghambat juga proses dekonsentrasi pengurusan lahan hutan dari pemegang konsesi ke masyarakat petani hutan.

Daftar Pustaka

Podes Belapunranga Tahun 2016

Profil Kelompok tani anggota Gapoktan desa Belapunranga tahun 2014

Profil Gapoktan Kelompok Tani Pencinta Alam Mandiri Desa Borissallo

Muhammad Ridha, Dkk *Konteks Perjuangan Merebut Akses Legal* (Makassar: Carabaca dan SCF: 2015)

Nancy Peluso *Hutan Kaya Rakyat Melarat* (Jakarta: Konpalindo dan Ford fOundation, 2006)